

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Triwulan I tahun 2021 menunjukkan bahwa inflasi di Kota Depok rendah, berturut-turut adalah: Januari (0,14), Februari (0,20) dan Maret (0,05). Inflasi bulan maret merupakan tingkat inflasi terendah diantara 7 Kab/Kota pantauan IHK (Indeks Harga Konsumen) di Jawa Barat. Kelompok Makanan dan Minuman masih menjadi penyumbang utama inflasi di triwulan I, yaitu pada kelompok bumbu dan sayur mayur seperti: cabai rawit, ketimun, kacang Panjang, jengkol, bawang bomay, bawang selatan, melon, jeruk nipis/limau. Berdasarkan data di atas, kelompok utama penyumbang inflasi di Kota Depok adalah Makanan, Minuman dan Tembakau dengan komoditas utama berupa sembako. Pengendalian inflasi menjadi penting, terutama dalam rangka mempertahankan nilai uang masyarakat yang pada akhirnya akan berperan penting dalam mempertahankan daya beli masyarakat terutama di masa pandemi ini. Untuk Bulan Januari 2021 di Kota Depok terjadi inflasi sebesar 0,14 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 106,56 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga dari beberapa komoditas, Komoditas dengan kenaikan harga tertinggi diantaranya adalah cabai rawit, ketimun, kacang panjang, jengkol, bawang Bombay, semangka, tempe, terong, buncis dan tahu mentah. Dari 11 (sebelas) kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, yakni Kelompok Makanan, Minuman & Tembakau sebesar 0,17 persen, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya sebesar 0,03 persen, Kelompok Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,17 persen, Kelompok Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran sebesar 0,83 persen, dan Kelompok Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya sebesar 0,20 persen. Sedangkan kelompok yang mengalami deflasi, yakni Kelompok Transportasi sebesar 0,02 persen dan Kelompok Rekreasi, Olahraga, & Budaya sebesar 0,06 persen. Sementara yang tidak mengalami perubahan, yaitu Kelompok Pakaian & Alas Kaki, Kelompok Kesehatan, Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan, serta Kelompok Pendidikan. Inflasi/deflasi terjadi karena adanya kenaikan/penurunan harga dari barang dan jasa yang ditunjukkan oleh kenaikan/penurunan indeks pada kelompok-kelompok barang dan jasa sebagai berikut : Kelompok Makanan, Minuman & Tembakau sebesar 0,17 persen, Kelompok Pakaian & Alas Kaki sebesar 0,00 persen, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, & Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,03 persen, Kelompok Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,17 persen, Kelompok Kesehatan sebesar 0,00 persen, Kelompok Transportasi sebesar -0,02 persen, Kelompok Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan sebesar 0,00 persen, Kelompok Rekreasi, Olahraga, & Budaya sebesar -0,06 persen, Kelompok Pendidikan sebesar 0,00 persen, Kelompok Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran sebesar 0,83 persen, dan Kelompok Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya sebesar 0,20 persen. Laju inflasi tahun kalender sebesar 0,14 persen dan laju inflasi "year on year" (Januari 2021 terhadap Januari 2020) sebesar 1,31 persen. Pada Bulan Februari 2021 di Kota Depok terjadi inflasi sebesar 0,20 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 106,77. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga dari beberapa komoditas, diantaranya yaitu ketela pohon, tariff bidan, penyegar ruangan, sop, tauge/kecambah, bawang merah, apel, jagung manis, tahu mentah dan ikan mas. Dari 11 (sebelas) kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, yakni Kelompok Makanan, Minuman & Tembakau sebesar 0,28 persen, Kelompok Pakaian & Alas Kaki sebesar 0,15 persen, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya sebesar 0,01 persen, Kelompok Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 1,03 persen, Kelompok Kesehatan sebesar 0,15 persen, Kelompok Rekreasi, Olahraga, & Budaya sebesar 0,01 persen, dan Kelompok Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran sebesar 0,89 persen. Sedangkan kelompok yang mengalami deflasi, yakni Kelompok Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya sebesar 0,34 persen.

Sementara yang tidak mengalami perubahan, yaitu Kelompok Transportasi, Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan, serta Kelompok Pendidikan. Inflasi/deflasi terjadi karena adanya kenaikan/penurunan harga dari barang dan jasa yang ditunjukkan oleh kenaikan/penurunan indeks pada kelompok-kelompok barang dan jasa sebagai berikut :

Kelompok Makanan, Minuman & Tembakau sebesar 0,28 persen, Kelompok Pakaian & Alas Kaki sebesar 0,15 persen, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, & Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,01 persen, Kelompok Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 1,03 persen, Kelompok Kesehatan sebesar 0,15 persen, Kelompok Transportasi sebesar 0,00 persen, Kelompok Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan sebesar 0,00 persen, Kelompok Rekreasi, Olahraga, & Budaya sebesar 0,01 persen, Kelompok Pendidikan sebesar 0,00 persen, Kelompok Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran sebesar 0,89 persen, dan Kelompok Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya sebesar -0,34 persen. Laju inflasi tahun kalender sebesar 0,20 persen dan laju inflasi “year on year” (Februari 2021 terhadap Februari 2020) sebesar 1,26 persen. Sementara pada Bulan Maret 2021 di Kota Depok terjadi inflasi sebesar 0,05 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 106,82. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga dari beberapa komoditas seperti bawang merah, tauge/kecambah, cabai rawit, melon, jeruk nipis/limau, terong, sambel jadi, bayam, ikan mas dan kangkung. Dari 11 (sebelas) kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, yakni Kelompok Makanan, Minuman & Tembakau sebesar 0,17 persen, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya sebesar 0,01 persen, Kelompok Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,21 persen, Kelompok Kesehatan sebesar 0,02 persen, Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,01, dan Kelompok Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran sebesar 0,03 persen. Sedangkan kelompok yang mengalami deflasi, yakni Kelompok Rekreasi, Olahraga, & Budaya sebesar 0,01 persen dan Kelompok Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya sebesar 0,35 persen. Sementara yang tidak mengalami perubahan, yaitu Kelompok Pakaian & Alas Kaki, Kelompok Transportasi, dan Kelompok Pendidikan. Inflasi/deflasi terjadi karena adanya kenaikan/penurunan harga dari barang dan jasa yang ditunjukkan oleh kenaikan/penurunan indeks pada kelompok-kelompok barang dan jasa sebagai berikut : Kelompok Makanan, Minuman & Tembakau sebesar 0,17 persen, Kelompok Pakaian & Alas Kaki sebesar 0,00 persen, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, & Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,01 persen, Kelompok Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,21 persen, Kelompok Kesehatan sebesar 0,02 persen, Kelompok Transportasi sebesar 0,00 persen, Kelompok Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan sebesar 0,01 persen, Kelompok Rekreasi, Olahraga, & Budaya sebesar -0,01 persen, Kelompok Pendidikan sebesar 0,00 persen, Kelompok Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran sebesar 0,03 persen, dan Kelompok Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya sebesar -0,35 persen. Laju inflasi tahun kalender sebesar 0,05 persen dan laju inflasi “year on year” (Maret 2021 terhadap Maret 2020) sebesar 0,95 persen.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

□ Angka Inflasi di Kota Depok pada Triwulan I Tahun 2021 cenderung cukup tinggi jika dibandingkan dengan angka inflasi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Nasional, hal ini dipicu oleh berbagai faktor, antara lain karakteristik Kota Depok yang merupakan daerah konsumen dan bukan daerah produsen yang hamper 97% kebutuhannya disupply dari daerah lain dan anomali cuaca yang mengganggu hasil panen di daerah produsen. □ Selain itu Inflasi Kota Depok juga didorong oleh beberapa faktor lainnya, antara lain terganggunya kelancaran pasokan karena terganggunya kelancaran distribusi dari daerah produsen akibat banjir seiring curah hujan yang tinggi dan pembangunan infrastruktur yang masih berlanjut. Adapun

Komoditas penyumbang inflasi terbesar masih didominasi dari volatile food dan juga beberapa administered prices. □ Disamping hal tersebut diatas, masa Pandemi Covid19 di Indonesia yang juga terjadi di Kota Depok masih berlangsung dan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara proporsional pra Adaptasi Kebiasaan baru (AKB) untuk pencegahan, penanganan dan pengendalian Covid19 di Kota Depok masih dilakukan melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berbagai upaya pengendalian inflasi di Kota Depok pada Triwulan I Tahun 2021 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok diantaranya : □ Pemantauan terhadap jaminan ketersediaan pasokan sembako dan antisipasi terhadap kenaikan harga □ Menyiapkan langkah operasi pasar baik melalui dukungan APBD atau oleh stake holder seperti TTIC (Toko Tani Indonesia Center) Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian □ Melakukan penjajagan Kerjasama antar daerah dalam rangka menjamin pasokan □ Menggiatkan pemanfaatan lahan pekarangan untuk kegiatan pertanian melalui P2L (Pekarangan Pangan Lestari) □ Sebagai bentuk Adaptasi Kebiasaan Baru di masa Pandemi Covid 19, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok telah menyediakan Program Belanja Online di 7 (Tujuh) Pasar Tradisional yang ada di Kota Depok dengan memanfaatkan aplikasi Tokoku. □ Selain itu Dinas Perdagangan dan Perindustrian tetap melaksanakan kegiatan rutin seperti Sidak Pasar dan Updating Harga Pangan melalui portal e-Priangan yang berubah menjadi Silinda Di Jabar, Dinas Kesehatan juga melaksanakan kegiatan terkait keamanan pangan, Dinas Sosial melakukan kegiatan penyaluran Komoditas Bantuan Pangan Non Tunai bagi penerima manfaat Program Keluarga Harapan dan Diskominfo melakukan kegiatan Diseminasi Informasi melalui berbagai media tentang pengendalian inflasi.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

□ Pengendalian inflasi harus menjadi perhatian semua pihak. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi kurang bermakna apabila diikuti oleh kenaikan inflasi yang tinggi pula, upaya pengendalian inflasi di tahun ini akan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Salah satunya karena kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung saat ini. □ Kegiatan-kegiatan terkait upaya pengendalian inflasi di Kota Depok telah banyak dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Kota Depok, namun demikian perlu ditingkatkan koordinasi dan sinergi agar upaya yang dilakukan bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal. □ Koordinasi semua pihak, terutama Kolaborasi dan Sinergi diantara Perangkat Daerah Pemerintah Kota Depok perlu terus diperkuat sehingga pihak terkait dapat mensinergikan berbagai kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan. Acara High Level Meeting (HLM) TPID Kota Depok juga diharapkan dapat semakin memperkuat komitmen kita semua dalam mengupayakan pengendalian inflasi yang lebih efektif. □ Selain itu perlu semakin banyak dikembangkan Inovasi dan Kolaborasi Program dan Kegiatan yang menyesuaikan dengan kondisi Pandemi Covid19 dengan menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat. □ Secara Tahun Kalender dari Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Maret 2021, atau angka Inflasi Kota Depok triwulan I, 2021 sebesar 0.39 persen. Sementara angka inflasi DKI Jakarta sebesar 0.38 persen, Jawa Barat 0.36 dan nasional 0.44 persen, namun demikian dalam pemenuhan bahan kebutuhan pokok masyarakat tidak mengalami kendala karena ketersediaan pasokan yang mencukupi.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

□ Beberapa Rekomendasi Kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok untuk menanggulangi berbagai isu pengendalian inflasi pada Triwulan I Tahun 2021 adalah: 1. Kerja Sama Antar Daerah untuk memenuhi kebutuhan komoditas yang defisit pasokannya (daerah produsen pangan di Jawa Barat) 2. Penetapan kebijakan tarif yang diatur oleh pemerintah secara terukur dan mempertimbangkan waktu implementasinya 3. Penguatan koordinasi dan awareness 4. Penguatan peran Pasar Induk/Besar sebagai Buffer Stock 5. Pengkinian data neraca pangan Kota Depok sebagai pendukung dalam pengambilan kebijakan 6. Pengkinian data secara berkala pada SILINDA JABAR sebagai Early Warning System (EWS) / integrasi dengan sistem yang sudah dimiliki 7. Optimalisasi BUMD di Kota Depok sebagai Stabilisator Harga Pangan 8. Digitalisasi transaksi perdagangan